

INDIKATOR KINERJA UTAMA URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2021-2026

1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

- 1) IKK Outcome : Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda
- Penjelasan IKK Outcome

| | | |
|-----------------|---|--|
| Konsep/Definisi | : | Mengukur persentase usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda |
| Rumus | : | $\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0 \end{aligned}$ |

- Penjelasan IKK Output

| IKK Outcome | | IKK Output | Rumus | Ket |
|---|----|--|--|--|
| Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda. | 1) | Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi | Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi (ada/tidak) | Menunggu Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. (Tidak ada) |

| | | | | |
|--|----|---|---|---|
| | 2) | Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi | Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi (ada/tidak) | Menunggu Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. (Tidak ada) |
| | 3) | Perda/Pergub terkait Izin Penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi | Perda/Pergub terkait Izin Penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi (ada/tidak) | Terkaitnya UU no 11 Tahun 2021 jo PP No PP 5 Tahun 2021. (Tidak ada) |
| | 4) | Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah | Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah (ada/tidak) | Pergub Jambi No 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi, Tidak berlaku sejak UU 17 Tahun 2019 terbit sehingga menunggu permen ESDM terbaru. (Tidak ada) |
| | 5) | Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi | Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi (ada/tdak) | Tidak ada |
| | 6) | Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan daerah provinsi | Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan daerah provinsi (ada/tidak) | Tidak ada |
| | 7) | Perda/Pergub terkait IUJP | Perda/Pergub terkait IUJP (ada/tidak) | Tidak ada |
| | 8) | Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009 | Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009 (ada/tidak) | Terkait UU No 3 Tahun 2020 Terkait perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. (Tidak ada) |
| | 9) | Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan | Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan. (ada/tidak) | Tidak ada |

| | | | | |
|--|-----|---|--|---|
| | 10) | Jumlah Penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun | Jumlah Penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun. (ada/tidak) | Tidak ada |
| | 11) | SK izin usaha niaga bahan bakar nabati | Jumlah SK izin usaha niaga bahan bakar nabati | Tidak ada |
| | 12) | Perda/pegub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan,pembinaan dan pengawasan) | Perda/pegub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan,pembinaan dan pengawasan) (ada/tidak) | Perda Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2017 tentang ketenagalistrikan. (Ada) |
| | 13) | Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalansinya dalam daerah provinsi | Perda/Pegub terkait izin operasi dalam daerah provinsi (Tata cara penerbitan,pembinaan dan pengawasan) (ada/tidak) | |
| | 14) | Perda/Pegub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi | Peraturan gubernur terkait Penetapan (Penyesuaian)tariff Tenaga Listrik untuk Pemegang izin yang wilayah Usahanya Berada Dalam 1 Provinsi (ada/tidak) | Tidak ada |
| | 15) | Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik,penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi | Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik,penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi (ada/tidak) | Tidak ada |
| | 16) | Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya | Jumlah izin usaha penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri | 6 Penerbitan rekomendasi teknis Tahun 2021 (Ada) |

| | | | | |
|--|-----|--|---|-----------|
| | | dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah | kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah (ada/tidak) | |
| | 17) | Pelaksanaan pembangunan listrik pedesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu | Total Penambahan Rumah Tangga Berlistrik | Tidak ada |

- 2) IKK Outcome : Persentase Desa yang teraliri Listrik
- Penjelasan IKK Outcome

| | | |
|-----------------|---|---|
| Konsep/Definisi | : | Mengukur persentase desa yang telah teraliri listrik |
| Rumus | | $= \frac{\text{Jumlah desa yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$ $= \frac{1.554}{1.562} \times 100\%$ $= 99,49\%$ |

Jambi, Januari 2022

KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671202 199203 1 003

| | |
|--|--|
| KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI | SEKRETARIS |
| <u>FITRIYAH INDIRIYANI, SE, MM</u> NIP. 19780821 199803 2 005 | <u>ACHMAD NUZLI, S.STP, MA</u> NIP. 19820909 200112 1 002 |